

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PANDANGAN AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah catatan. Fraksi meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan basis data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pencegahan kebocoran, serta pemanfaatan QRIS dan e-ticketing untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Upaya meningkatkan kemandirian fiskal juga ditekankan agar tidak membebani masyarakat kecil secara berlebihan.

Terhadap belanja daerah, Fraksi meminta pengawasan atas tambahan belanja modal, percepatan pengadaan tanpa mengabaikan transparansi dan kualitas pekerjaan, serta perbaikan mekanisme bantuan sosial agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Fraksi juga menekankan agar penyesuaian anggaran diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, serta meminta dokumen anggaran disajikan lebih informatif dan terperinci agar perubahan dan pergeseran anggaran dapat diketahui dengan jelas.

Catatan:

- Pandangan Akhir disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 8 September 2026.
- Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat paripurna.
- Dokumen ditandatangani oleh Bambang Sutrisno, S.E. selaku Ketua Fraksi dan Sugeng Wibawa selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 10 halaman termasuk halaman sampul.

Kata Kunci: PDI Perjuangan; Perubahan APBD 2026; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah; Bantuan Sosial; Pengentasan Kemiskinan; Kesejahteraan Masyarakat

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. FINAL OPINION OF THE PDI PERJUANGAN FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE 2026 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

The PDI Perjuangan Faction of the Kebumen Regency Regional House of Representatives (DPRD) accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for enactment as a Regional Regulation, subject to several recommendations. The Faction called for the optimization of Regional Own-Source Revenue through improvements to taxpayer databases, revenue intensification and extensification, prevention of revenue leakage, and the use of QRIS and e-ticketing to strengthen transparency and oversight. Efforts to improve regional fiscal independence should not impose excessive burdens on low-income communities. Regarding regional expenditure, the Faction emphasized oversight of additional capital expenditure, acceleration of procurement without compromising transparency and work quality, and improvements to social assistance mechanisms to ensure that eligible people receive assistance accurately and on time.

The Faction also emphasized that budget adjustments should prioritize programs with tangible benefits for the public, particularly poverty reduction and improved community welfare, and called for more informative and detailed budget documents so that budget shifts and adjustments can be clearly identified.

Note:

- *The Final Opinion was presented at the Plenary Meeting of the Kebumen Regency DPRD on September 8, 2026.*
- *The PDI Perjuangan Faction accepted and approved the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the 2026 APBD, with its recommendations forming an integral part of the plenary meeting record.*
- *The document was signed by Bambang Sutrisno, S.E., as Chair of the Faction, and Sugeng Wibawa, as Secretary of the Faction.*
- *The document consists of 10 pages, including the cover page.*

Keywords: *PDI Perjuangan Faction; 2026 APBD Amendment; Regional Own-Source Revenue; Regional Expenditure; Social Assistance; Poverty Reduction; Community Welfare*